

TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN AZAS LEGALITAS ADAT MINANGKABAU DALAM PUTUSAN MAKAMAH AGUNG NOMOR 839.K/PDT/2005

Antony Firman¹, Suhariningsih², Lutfi Effendi³

Program Studi Magister Kenotariatan
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341)553898 Fax (0341) 566505
Email: firmanmkn@gmail.com

Abstract

This research was conducted background review the Supreme Court decision that has been synchronized with the customary rules of Minangkabau to be able to give the settlement a dispute that occurred among people minang over ownership rights to the land that has been issued a certificate on behalf of the owner and issued a second time as a replacement for the previous certificate in the name of the expert next of kin, has issued the National Land Agency conducted the prosecution of issuance of certificates issued and declared unlawful. Against all the decision of the Court declared all files attached lawful and otherwise receive legal protection by the Supreme Court that states high court ruling does not fundamentally against the cancellation of the decision of the district court Painan.

This research method is a normative juridical legal research process penganalisan appropriate decisions in accordance with laws and regulations applicable to the parties in obtaining the truth of proprietary rights held otherwise meet the elements of the agreement reached a consensus has been made by the parties to advance in legal actions on granting sebahagian Malay ethnic treasures given to his brother different tribes, different Ranji, different treasures, relics of the elders / fathers who are his own brother who was never questioned on their freelance grant had done.

*Behind the warring parties to fight the law on the release of the court's decision to appeal to the Supreme Court attached to the principle of *lex superiori inferiori derogate lex* (the law of higher legal mengenyampingkan lower), in the case of the determination decision that has had permanent legal force / *Ingracht*. Defective or not a decision had to be reviewed from the principles of the decision contained in Article 50 of Law Number 48 Year 2009 concerning Judicial Authority and Article 178 HIR / 189Rbg contain a clear rationale and detailed enough discretion to excuse or *onvoldoende gomotiveerd* which can be taken into consideration certain Articles, legislation, common law, jurisprudence, or legal doctrine. In an effort *peleksanaan* command execution has the power *executorial* to decisions that are *kondemnatoir* an immediate emptying of a plot of land and / or buildings that exist *dilahan* dispute may be given legal protection include: 1. Preventive protection is through legislation in the implementation of the execution orders can be carried out immediately. 2. Protection of repressive law consists of (a) the protection of the law through litigation by Technical Directive No. 05 / JUKNIS / DV / 2007 on *pelksanaan* mechanisms of mediation and (b) protection of the law through litigation.*

¹ Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

² Pembimbing I, Guru Besar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

³ Pembimbing II, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Suggestions are given the results of this study is to assert the validity of a certificate is only the State Administrative Court / Administrative Court.

Key words: *determination, execution of the judgment, obtain legal protection*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan berlatar belakang tinjauan putusan Makamah Agung yang telah disinkronisasikan dengan aturan adat Minangkabau untuk dapat memberi penyelesaian perseteruan yang terjadi antara sesama orang minang atas kepemilikan hak atas tanah yang telah diterbitkan sertifikat atas nama pemiliknya dan diterbitkan kedua kalinya sebagai pengganti sertifikat terdahulu atas nama ahli warisnya, telah dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional dilakukan penuntutan atas terbitnya sertifikat yang dikeluarkan dan dinyatakan tidak sah menurut hukum. Terhadap semua putusan badan peradilan menyatakan semua berkas yang dilampirkan sah menurut hukum dan dinyatakan mendapat perlindungan hukum oleh Makamah Agung yang menyatakan putusan pengadilan tinggi tidak mendasar terhadap pembatalan putusan pengadilan negeri Painan.

Metode penelitian ini yuridis normatif yang melakukan proses penganalisan keputusan menurut Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku bagi para pihak dalam memperoleh kebenaran atas hak kepemilikan yang dimiliki dinyatakan memenuhi unsur kesepakatan yang mencapai kata mufakat. Para pihak dahulu di dalam melakukan perbuatan hukum atas pemberian sebahagian harta pusaka suku melayu yang diberikan pada saudaranya sendiri yang berbeda suku, berbeda ranji, berbeda harta pusaka, peninggalan para nenek mamak/ moyang yang merupakan saudaranya sendiri yang tidak pernah mempermasalahkan atas adanya pemberian hibah lepas yang telah dilakukannya.

Pihak yang berseteru balik melakukan perlawanan hukum atas keluarnya putusan pengadilan tersebut sampai banding ke Makamah Agung melekat asas *lex superior derogate lex inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah), dalam hal penetapan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ *Ingkracht*. Dalam upaya perintah pelaksanaan eksekusi yang mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap putusan yang bersifat kondemnatoir segera dilakukannya pengosongan sebidang tanah dan/ atau bangunan yang ada dilahan sengketa dapat diberi perlindungan hukum diantaranya: 1. Perlindungan preventif yaitu melalui peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan perintah eksekusi tersebut dapat dilakukan segera. 2. Perlindungan hukum represif terdiri dari (a) perlindungan hukum melalui jalur litigasi berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang mekanisme pelaksanaan mediasi dan (b) perlindungan hukum melalui jalur litigasi. Saran yang diberikan hasil penelitian ini adalah yang dapat menyatakan sah atau tidaknya sebuah sertifikat hanyalah Peradilan Tata Usaha Negara/ PTUN.

Kata kunci: penetapan, pelaksanaan putusan, mendapatkan perlindungan hukum

Latar Belakang

Dalam penyelesaian masalah yang terjadi antara pihak yang berseteru merupakan orang Minangkabau yang menganut system Matrilineal, yaitu suatu system yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terkait dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu, oleh karena itu waris dan pusaka diturunkan menurut garis ibu, berbeda suku, berbeda harta peninggalan, dan bukan seranji. Permasalahan yang terjadi dikarenakan pihak suku tanjung telah diberikan sebagai tanah paparikan peninggalan suku melayu yang merupakan harta pusaka suku melayu yang mana pada jaman dahulu telah diberikan kepada pihak suku tanjung yang merupakan masih kerabatnya sendiri yang mana pada dahulukala hingga dalam kurun waktu ± 82 tahun tidak ada permasalahan atas adanya pemberian sebagian harta pusaka tinggi kaum suku melayu tersebut.

Secara akademis permasalahan yang terjadi mengenai tanah yang sering muncul disebabkan beberapa factor munculnya konflik antara lain:

- Keterbatasan ketersediaan tanah
- Ketimpangan dalam stuktur penguasaan tanah tersebut yang sering muncul diantara orang dengan perorangan maupun badan hukum sekalipun.
- Ketiadaan persepsi yang sama antara pengelola Negara mengenai makna penguasaan tanah oleh Negara.
- Inkonsistensi
- Ketidak sinkronisasian dengan penerapan aturan pertanahan itu sendiri, sering menimbulkan permasalahan penetapan hak atas tanah tersebut dikalangan masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pertanahan yang ada.

Perolehan tanah tersebut dapat dilakukan penerbitan sertifikat dengan cara mendaftarkan ke kantor Pertanahan Nasional Painan atas dasar adanya bukti tertulis berupa surat keterangan (29 Juli 1928) seluas 1.746 M² yang ada dan berisikan pernyataan telah memberikan sebahagian harta peninggalan suku melayu kepada suku tanjung dan menyatakan sudah tidak berhak lagi atas semua itu. Dalam putusan yang telah diputuskan menyatakan semua barang bukti tertulis yang dilampirkan dipersidangan dinyatakan sah menurut hukum dan menolak semua pernyataan yang dilampirkan pihak suku melayu serta

dinyatakan sebagai penuntut yang tidak benar dalam putusan pengadilan kasasi yang telah dilaksanakan (PN Nomor 03/Pdt.PLW/2014/PN.Painan).

Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan, bahwa sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila dapat dipenuhi beberapa unsur unsur secara kumulatif, diantaranya :

1. Surat kepemilikan berupa sertifikat yang sah tercantum nama orang atau badan hukum tertentu yang tercantum namanya.
2. Perolehan atas tanah dilakukan dengan itikad baik tanpa adanya unsur unsur tertentu yang melanggar aturan.
3. Tanah telah dikuasai secara nyata
4. Dalam sengkang waktu yang telah diberikan Badan Pertanahan Nasional selama 5 (lima) Tahun sejak mau diterbitkan surat kepemilikan hak atas tanah/ sertifikat dapat diumumkan di kantor Pertanahan Nasional tempatnya membuat. Dan bila selama waktu yang ditentukan telah habis (tidak adanya sanggahan) maka BPN akan mengularkan dan menerbitkan sertifikat atas nama hak atas tanah tersebut.

Dalam Pasal 4 Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986 yang telah dirombak dengan pembaharuan pembaharuan isi dari aturan tersebut dengan telah dikeluarkannya UU No. 08 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum yang menyatakan tugas tugas pokok Badan Peradilan diantaranya dapat menerima, memeriksa, mengadili dalam melanjutkan setiap penyelesaian perkara yang sedang dipimpinya/ diajukan kepadanya. Dengan dikeluarkannya suatu putusan oleh Majelis Hakim merupakan bagian dari penyelesaian yang dilakukannya badan peradilan tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 178 HIR/ 189 Rbg yang dijelaskan dengan telah keluarnya suatu putusan maka hakim melakukan musyawarah untuk pengambilan suatu keputusan yang akan diumumkan/ dijatuhkan dalam bentuk putusan.

Cacat atau tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan yang hakekatnya asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 dan Pasal 189 Rbg dan terdapat juga dalam Pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, diantaranya memuat:

- Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci pada setiap putusan yang telah dijatuhkan/ diputus setiap hakim haruslah mendasar pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang memenuhi ketentuan tersebut dapat dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau/ Onvoldoende gomotiveerd.
- Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa Pasal pasal tertentu, peraturan perundang undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, atau doktrin hukum.

Fungsi keadilan diantaranya:

- a. Sebagai pengadilan Negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Kasasi yang memiliki tugas dapat memberikan pembinaan kesemerataan dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi serta melakukan peninjauan kembali supaya dapat menjaga pemerataan semua aturan hukum yang diterapkan dalam bentuk Undang undang diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar.
- b. Diantara tugas lainnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan dapat memeriksa juga memberikan putusan yang dalam penyelesaian persengketaan dinaikkan ke proses banding/ diambil alih pada tingkat pertama dan terakhir.
- c. Keterkaitan dengan berbagai fungsi peradilan diantaranya hak uji materiil yaitu wewenang untuk menguji/ menilai secara materiil peraturan perundang undangan dibawah Undang undang tentang hal apakah suatu peraturan dapat dilakukan peninjauan dari materinya (isi) mempunyai pertentangan apa tidak dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi atau tidak yang tertuang dalam Pasal 31 Undang undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985.

Fungsi pengawasan badan peradilan diantaranya:

- a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan pengadilan dapat diselenggarakan dengan seksama secara wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana dilakukan dengan cepat dengan penggunaan dana yang murah/ ringan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam pemeriksaan dan memberikan putusan

suatu perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang undang Ketentuan pokok kekuasaan kehakiman Nomor 14 Tahun 1970) yang dipimpinnya dalam penyelesaian suatu persidangan.

- b. Makamah Agung dapat melakukan pengawasan setiap pekerjaan pengadilan terutama pada sikap tingkah laku para hakim serta setiap perbuatan pejabat pengadilan setiap melakukan tugasnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman. Diantaranya dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, juga dapat meminta keterangan tentang hal hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta dapat memberikan peringatan, teguran serta penunjukkan tanpa mengurangi kebebasan hakim tersebut Pasal 32 Undang undang Makamah Agung Nomor 14 Tahun 1985.

Setelah kesepakatan pemberian sebagian lahan tanah, segera melakukan perbuatan hukum dengan membuat surat keterangan/ pernyataan yang dibuat dan diketahui para ketua wali nagari pemerintahan salido kecamatan IV, pemerintahan wilayah kecamatan IV Jurai Salido Kabupaten Pesisir selatan pada tanggal 29 Juli 1928 yang turut memberikan tanda tangan/ fungsionaris adat pada surat keterangan tersebut, yang mana mereka turut menjadi Tergugat II,III, dan IV karena dianggap membantu serta memberikan keterangan atas dasar pembuktian kebenaran surat pernyataan yang telah dibuat para pihak tersebut. pada tanggal 3 maret 1982 pihak yang merasa memiliki lahan tanah tersebut (Sainar dan Bustaman) melakukan pendaftaran pada Badan Pertanahan Nasional Painan untuk membuat surat kepemilikan atas hak atas tanah tersebut dengan dasar adanya surat keterangan yang telah dibuat dan menghadirkan serta mempertanyakan pada pihak yang ada dalam surat keterangan yang dibuat diantaranya ketua Wali Nagari, kepala camat IV Juarai Salido, pemerintahan wilayah Salido Kabupaten pesisir selatan yang membenarkan surat keterangan tersebut.

Setelah pendaftaran dilakukan Badan Pertanahan Nasional Painan melakukan prosedur pelaksanaan yang diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 13 dan Pasal 28 Jo Pp No 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah, yang mana sebelum diterbitkannya sertifikat atas nama tersebut disediakan waktu selama 5 (lima) tahun untuk melakukan tindakan tidak terima/ pihak ketiga yang

mempermasalahkan terhadap hak atas tanah tersebut, tetapi setelah jangka waktu yang disediakan tersebut habis tidak adanya pihak yang merasa dirugikan atau protes atas hak kepemilikan yang akan dilakukan penyuratan dengan menerbitkan sertifikat hak atas nama kepada Badan Pertanahan Nasional Painan.

Bahwa pertimbangan *Judex facti* Pengadilan Negeri tersebut berdasarkan surat keterangan telah dinyatakan dan berbunyi dengan tegas kaum suku melayu yang pada masa itu Madaam, Samat, Oemi dan saleh menyerahkan tanpa syarat pada Siti dan Bustaman/ suku tanjung berupa tanah dengan menyatakan dengan tegas “ tidak kami berhak lagi “ atas tanah yang telah diberikan yang merupakan sebagian dari harta peninggalan suku melayu.

Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan yakni apakah putusan Makamah Agung Nomor 839.K/Pdt/2005 telah memberi keadilan bagi para pihak yang bersengketa?

Jurnal ini disusun berdasarkan metode penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*concept approach*), yang didukung dengan beberapa putusan pengadilan negeri, tinggi serta putusan Makamah Agung yang didukung dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan yang berlaku dan buku buku hukum yang relevan dengan isu hukum yang singkat dalam jurnal ini.

Pembahasan

A. Tinjauan Terhadap Penerapan Nilai Nilai Keadilan Adat Minangkabau Dalam Putusan Makamah Agung Nomor 839.K/Pdt/2005.

Hukum terlaksana sesuai dengan substansi hukum yang telah disepakati oleh masyarakat dimana hukum itu berlaku dengan cara mendaftarkan tanahnya kepada badan Pertanahan Nasioal yang ada dikabupaten/ kota. Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keluarnya putusan putusan yang dapat mewujudkan keadilan serta keinginan keinginan dalam penerapan hukum terhadap nilai-nilai keadilan dapat diwujudkan. Dalam hal ini keinginan hukum tidak lain adalah pikiran para hakim, badan

pembuat undang undang yang dirumuskan dalam pengambilan keputusan nantinya. hukum mempunyai tugas yang suci dan luhur ialah keadilan dengan member kepada tiap tiap orang terhadap apa yang merupakan hak yang ia terima, pelaksanaan atas itu diperlukan aturan yang mengatur, dimana peraturan ini sangat diperlukan masyarakat demi terwujudnya kepastian hukum⁴.

Menurut pendapat Radbruch menyatakan: “ pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga (3) aspek yang diantaranya”:

1. Keadilan dalam arti sempit

Keadilan ini berarti kesamaan hak semua orang sebagai warga Negara yang sedang atau dalam mempunyai urusan dalam persidangan dipengadilan.

2. Tujuan keadilan

Aspek ini dapat ditentukan isi hukum, karena harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai sebagai tujuan dari penyelesaian masalah tersebut.

3. Kepastian hukum/ legalitas

Dapat memberikan jaminan bahwa hukum juga mempunyai fungsi sebagai peraturan yang harus dilaksanakan atau diikuti dan dipatuhi.

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan didalam masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto “ kepastian hukum mengharuskan diciptakannya Peraturan peraturan umum atau kaedah kaedah yang berlaku umum, supaya terciptanya suasana yang aman dan tentram didalam masyarakat “. Kepastian hukum dapat dicapai apabila dalam situasi tertentu, antara lain :

- a. Tersedianya aturan aturan hukum yang jelas (bersih), selalu konsisten dan mudah diperoleh
- b. Instansi instansi penguasa/ pemerintah selalu menerapkan aturan aturan hukum yang benar dan mengedepankan keadilan tersebut secara konsisten berlanjutan selamanya.
- c. Hakim hakim yang jujur, mandiri, tidak berpihak, dalam menerapkan aturan aturan hukum tersebut secara berkelanjutan dalam menjalankan tugasnya dalam

⁴ H.lili Rasyid dan Ira Tharia Rasjidi, **Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum**, Citra Aditya bakti, Bandung.

penyelesaian suatu permasalahan atau perselisihan dalam penyelesaian persengketaan dalam suatu persidangan yang sedang dipimpinnya.

- d. Keputusan peradilan yang diambil harus konsisten mengedepan kebenaran secara penuh dapat dilaksanakan.
- e. Warga secara prinsipil dapat menyesuaikan tindakan dalam perilaku keseharian mereka terhadap aturan aturan tersebut.

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan yang dibuat diundangkan secara jelas pada aturan yang ditetapkan secara logis dapat diterima kalangan masyarakat banyak menerima atau tidak didalam penerapannya yang akan dilakukan oleh masyarakat. Dapat digaris bawahi peraturan yang tidak menimbulkan keragu ragan/ multi tafsir yang dapat diterima menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak saling berbenturan. Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum⁵. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk dapat memberikan jaminan serta ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat itu sendiri, karena kepastian hukum berupa peraturan maupun ketentuan ketentuan hukum yang mempunyai sifat sifat sebagai berikut:

1. Adanya paksaan dari luar/ sanksi dari penguasa yang mempunyai tugas agar dapat mempertahankan memberikan binaan terhadap tatanan tata tertib masyarakat dengan perantara keamanan yang ada yang merupakan alat keamanan yang selalu mengawalnya pemerintahan yang ada.
2. Sifat Undang undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan kepada sikap perilaku manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang dijadikan pedoman adalah bagaimana perbuatan lahiriyahnya seseorang tersebut. kepastian hukum tidak member sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk/ melanggar, akan tetapi yang akan dikenakan sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk dalam perwujudan pada kenyataan sikapnya seseorang itu melanggar ataupun tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Namun demikian dalam kenyataan kesehariannya (dalam

⁵ Yance Arizona, **Apa itu Kepastian Hukum?**, <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diakses 25 Maret 2015 pukul 20.15 WIB.

prakteknya) apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan maka kerap kali tidak sejalan satu sama lain, adapun hal ini dikarenakan disuatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip prinsip kepastian hukum.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dilakukan peninjauan nilai-nilai keadilan dalam setiap putusan, mengelola dan memproses data-data kedalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan hakim dalam pengambilan keputusan, maka diperlukan metode pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)⁶

Melakukan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi serta dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti⁷, yaitu mengenai landasan yuridis adanya surat keterangan yang dibuat, dalam penerbitan sertifikat hak milik dan dilakukan penerbitan sertifikat pengganti yang dilakukan pihak yang merasa memiliki lahan tersebut telah sesuai dengan PP No 24 Tahun 1997. Dalam putusan Mahkamah Agung diperintahkan melakukan upaya pelaksanaan eksekusi lahan W3.U9/35/HPDT/1/2014 upaya paksa langsung terhadap obyek perkara. Belum dapat terlaksana atas keluarnya putusan Mahkamah Agung No.839.K/Pdt/2005, dikarena masih adanya perlawanan dari pihak suku melayu terhadap lahan yang mau dieksekusi. Belum dapat terlaksanakan perintah tersebut, dan pada kelanjutannya pihak suku tanjung mengajukan kembali eksekusi kedua kalinya dengan mendaftarkan permohonan eksekusi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan Kabupaten Pesisir Selatan dan diterima yang mana masih menunggu jadwal pelaksanaan eksekusinya.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Metode yang menggunakan konsep-konsep ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum⁸, yaitu untuk memahami konsep-konsep yuridis mengenai upaya pengajuan peninjauan kembali yang dapat dilaksanakan apabila pihak suku

⁶ Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Surabaya kencana, Surabaya, 2010, hlm. 96.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 186.

⁸ *Ibid.*, hlm. 186.

melayu merasa tidak menerima hasil putusan Makamah Agung Nomor 839.K/Pdt/2005 tersebut namun pada pelaksanaannya ditolak agar dapat melampirkan pembuktian baru atas permasalahan yang telah diputuskan tersebut, dan apabila sebaliknya maka akan ditolak dengan alasan azas *lex superior derogate lex inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan hukum yang lebih rendah). Dan dalam konvensi dan rekonpensi Makamah Agung menimbang bahwa *yudex facti* pengadilan tinggi telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan salah dalam menerapkan hukum.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 08/Pdt.G/2003/PN.Painan dianggap tidak benar oleh Pengadilan Tinggi Padang sehingga Pengadilan Tinggi Padang mengambil keputusan yang tidak relevan atas putusan yang menyatakan putusan Pengadilan Negeri salah dalam mengambil putusan. Pihak yang merasa tidak menerima dalam hal ini sebagai pihak yang dituntut melakukan penuntutan kembali dengan melakukan banding ke Makamah Agung atas putusan Pengadilan Tinggi yang dianggap tidak mencerminkan keadilan bagi para pihak yang dalam hal ini pihak yang dituntut suku tanjung.

3. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Mengadakan studi perbandingan hukum yang merupakan suatu keinginan untuk membandingkan hukum Negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Metode pendekatan perbandingan ini digunakan untuk melihat dan membandingkan peraturan hukum Negara Indonesia dengan Negara lain dalam hal pengajuan permohonan upaya peninjauan kembali pasca setelah keluarnya putusan Makamah Agung tersebut.

Dalam mengambil putusan majelis Makamah Agung Nomor 839.K/Pdt/2005 menyatakan perbandingan putusan yang dapat diambil sebagai kebenaran akan nilai-nilai keadilan menerangkan, mengambil, dan melanjutkan adanya putusan pengadilan Negeri Painan Nomor 8/Pdt.G/2003/PN Painan sebagai perbandingan hukum yang benar dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aturan adat Minangkabau itu sendiri.

4. Pendekatan kasus (*case approach*)

Digunakan untuk mendukung analisis yang didapatkan dari pelaksanaan upaya pengajuan peninjauan atas putusan Makamah Agung yang telah diputuskan dapat dilakukan tuntutan lagi atau tidak dapat dilakukan.

Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri tersebut didasarkan adanya pembuktian P.II/T.I/ berupa surat keterangan 29 juli 1922 yang dilampirkan dipersidangan oleh para pihak-pihak yang berseteru, dimana surat bukti dengan tegas menyatakan jika kaum penggugat (suku melayu) yang pada masa itu Maadam, Samat, Oemi dan Saleh menyerahkan tanpa syarat pada Siti dan Bustaman (suku tanjung) berupa tanah objek sengketa, bahkan dalam surat tersebut terdapat kata-kata “ tidak ada kami berhak lagi”.

Dapat diambil kesimpulan memang benar nyatanya bahwa dahulu kala memang benar ada pemberian sebagian tanah peninggalan yang merupakan harta pusaka tinggi ranji suku melayu, diserahkan kepada suku tanjung yang menerima dikarenakan sebagai pembalasan terhadap apa yang pernah dilakukan para orang terdahulu untuk saling bantu membantu yang mana suku tanjung terlalu sering memberikan pinjaman uang kepada suku melayu, yang mana tidak dapat membayarnya kembali dan dengan demikian diambil langkah jalan tengah/ opsi penyelesaian dengan melepaskan sebagian harta peninggalan yang merupakan harta tinggi tersebut. Pemberian dilakukan mengetahui para saksi juga para tetua adat sebagai fungsionaris desa, para tetua adat kanagarian salido juga pada kecamatan pada saat itu pun turut dihadirkan serta ikut memberikan tanda tangan diatas surat keterangan yang dibuat dibawah tangan oleh pewaris pada dahulunya.

Pewaris telah memberikan sebagian tanah tersebut karena telah rela dengan suka rela, demikianlah suku tanjung menerima semua itu serta dapat menguasai lahan tersebut hingga hidup dilahan tersebut dengan mendirikan bangunan rumah kecil, setelah lama kelamaan meninggal dan dikubur dilahan tersebut. Hingga saat ini lah yang dijadikan permasalahan mengapa pihak suku tanjung masih menginginkan akan hak atas tanah tersebut karena hanya ingin mempertahankan adanya pemakaman leluhur ditanah tersebut yang merupakan amanat dari kedua orang tua agar tanah tersebut tetap berada

dalam penguasaan kita suku tanjung, dilakukan penerbitan sertifikat agar dapat memberikan jaminan hukum terhadap semua itu.

Dalam kaitannya dengan usaha memperoleh keadilan dalam penerimaan putusan pengadilan yang ada maka alat bukti tertulis dapat diperiksa dan diteliti oleh hakim dengan maksud dari pembuktian tertulis yang dilampirkan sebagai curahan isi hati atau penyampaian buah pikiran seseorang yang dipergunakan sebagai pembuktian⁹. Bukti tertulis ini dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul dalam suatu permasalahan dimuka pengadilan, dan bukti yang disediakan pada lazimnya berupa tulisan.

Ada tiga (3) alat bukti yang biasa diketahui oleh masyarakat diantaranya :

a) Akta otentik

Akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai alat bukti yang sempurna bagi orang yang mendapat hak dari padanya. Isi dari akta tersebut oleh para hakim dianggap benar, selama ketidak benarannya tidak dapat dibuktikan terhadap pihak ketiga (3), akta tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, melainkan hanya bersifat alat pembuktian yang penilaiannya diserahkan pada kebijaksanaan hakim, dengan kata lain hanya bersifat bukti saja.

b) Akta bawah tangan adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh pihak-pihak dalam kontrak secara pribadi, dan bukan dihadapan notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan beberapa jenis kontrak yang harus dilakukan melalui akta otentik dan yang cukup dilakukan melalui akta bawah tangan.

⁹ M.Nur Rasaid,SH., **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika , Jakarta, 2013, hlm. 38.

c) Surat biasa

Surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan atau informasi secara tertulis dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, baik atas nama sendiri, maupun atas nama jabatannya dalam sebuah organisasi, instansi ataupun perusahaan. Informasi-informasi ini dapat berupa permintaan, laporan, pemikiran, saran-saran dan sebagainya dapat dijadikan pembuktian tertulis dihadapan hakim.

Pengertian Surat Menyurat

Surat menyurat adalah suatu kegiatan untuk mengadakan hubungan secara terus menerus antara pihak yang satu kepada pihak yang lainnya. Dan dilaksanakan dengan saling berkiriman surat. Kegiatan surat menyurat ini disebut juga dengan istilah lainnya yaitu korespondensi. Jika hanya sepihak saja yang mengirimkan surat secara terus menerus tanpa ada balasan atau tanggapan dari pihak lainnya hal ini tidak dapat dinamakan kegiatan surat menyurat. Setiap kerja perorangan apalagi organisasi selalu membutuhkan kerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuannya.

Akta otentik juga mempunyai kekuatan pembuktian diantaranya :

a. Kekuatan pembuktian formil

Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah dapat menerangkan apa yang tertulis dalam isi akta tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

b. Kekutan pembuktian materiil

Dapat memberikan pembuktian antara para pihak memang benar benar isi dari peristiwa yang dituangkan kedalam akta tersebut benar benar terjadi dan nyata apa adanya.

c. Kekuatan mengikat

Agar dapat membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum yang dapat menerangkan apa yang tertulis dalam akta tersebut.

Kepastian hukum yang sebenarnya terletak pada kekuatan sertifikat kepemilikan tanah hak atas tanah sebagai tanda bukti kepemilikan termasuk di pengadilan¹⁰. Di Indonesia, sertifikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah* yaitu :

Pasal 31 ayat (1)

“sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegangan hak yang bersangkuatan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) “

Kegiatan Pendaftaran Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 UUPA tersebut meliputi:

- a. Pengukuran pemetaan dan pembukuan tanah
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh Kantor Pertanahan adalah perbuatan hukum dibidang Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, Badan Pertanahan Nasional selaku Instansi Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PTUN adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara sengketa Tata Usaha Negara. Perselisihan tersebut adalah sengketa yang ada dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku¹¹.

¹⁰ S.Candra, **Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah (Persyarat Permohonan di Kantor Pertanahan)**, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 122.

¹¹ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang **Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 Ayat (10)**.

Kajian mengenai kekuatan berlakunya sertifikat sangat penting, setidaknya karena sertifikat memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi orang yang namanya tercantum dalam sertifikat dan mencegah terjadinya persengketaan atas objek tanah tersebut. Kepemilikan sertifikat tersebut akan memberikan perasaan tenang dan tentram karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh siapapun/ pihak lain yang mengganggu perolehan hak atas tanah tersebut. Dan dengan adanya sertifikat itu pemilik atas hak tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Salah satu hak atas tanah yang harus bersertifikat yaitu Hak Milik, Hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yaitu Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Menurut Urip susanto, beralihnya hak milik atas tanah yang telah bersertifikat harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan kabupaten/ kota setempat. Maksud pendaftaran peralihan hak milik atas tanah ini adalah untuk tertib administrasi seperti dicatat dalam buku tanah dan dilakukan perubahan nama pemegang hak dari pemilikan tanah kepada para ahli warisnya¹². Proses pendaftaran dapat dipenuhi semua persyaratannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan penetapan secara sah mendapat surat keputusan pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional yang ada di kabupaten/ kota dan secara otomatis mendapat perlindungan serta kepastian hukum.

Permasalahan yang ada dalam beberapa penelitian adanya putusan pengadilan yang memberikan penetapan putusan oleh hakim telah memenuhi kriteria kebenaran adanya Peraturan Pemerintah yang diselaraskan dengan aturan adat Minangkabau yang menurut pengamatan dan pengkajian kebenaran putusan yang telah dikeluarkan telah menggambarkan akan nilai-nilai keadilan yang ada. Tetapi para pihak terutama pihak-pihak yang kalah (suku melayu) hingga saat ini belum dapat menerima dengan ikhlas akan putusan tersebut dan masih melakukan perlawanan hukum terhadap perselisihan yang ada dan selalu dikalahkan oleh hakim karena permasalahan ini tidak dapat memberikan

¹² Susanto Urip, **Hukum Agrarian dan Hak-hak Atas Tanah**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 91.

pembuktian yang baru/PK atas putusan Makamah Agung yang ada karena telah memiliki Putusan Inkracht/ berkekuatan hukum tetap.

Simpulan

Pembahasan serta peninjauan putusan-putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Putusan Makamah Agung dapat diambil garis besar terhadap semua putusan yang ada diantaranya:

1. Penerapan pengambilan keputusan yang dilakukan para hakim majelis telah memenuhi aturan yang sesuai dengan kewenangan serta tugas yang melekat pada seorang hakim tersebut. telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diselaraskan dengan peraturan pemerintah, serta sangat memperhatikan aturan yang telah dijadikan adat oleh anggota masyarakat yang dapat menjadikan contoh peneparan nilai-nilai keadilan telah dilaksanakan dengan baik sehingga nilai keadilan masih dapat dirasakan setiap kebenaran yang nyata telah sesuai dengan apa yang merupakan hak nya seseorang apa tidak merupakan haknya dan dipertanggung jawabkan kebenaran dalam pengambilan keputusan tersebut.
2. Penyelesaian perselisihan yang terjadi dapat dijadikan contoh betapa sangat disesalkannya terjadi perselisihan dengan ahli waris yang sekarang yang merupakan generasi keturunan yang ada sekarang, menimbulkan perpecahan tali persaudaraan sesama anggota/ masyarakat Minang, yang mana para orang terdahulu telah sepakat memberikan dan menerima akan permasalahan sebahagian tanah untuk saudaranya sendiri. Salah satu pihak dari suku tanjung sendiripun merasa berhak atas pembagian tersebut karena keinginan menjaga dan merawat pemakaman nenek moyangnya suku tanjung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

HJ. Lili Rasyid dan Ira Rasyid, 2010, **Dasar dasar Filasafat dan Teori Hukum**, Citra Adityha, Bandung

M. Nur Rasaid, SH., 2013, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta.

S. Candra, 2005, **Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah (Persyarat Permohonan di Kantor Pertanahan)**, Grasindo, Jakarta.

Susanto Urip, 2009, **Hukum Agraria dan Hak hak Atas Tanah**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Chairul Anwar, 1997, **Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau**, Rieneka Cipta, Jakarta.

Effendi Parangin, 1986, **Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum**, Rajawali, Jakarta.

L.J.Van Apeldoorn, 2000, **Pengantar Ilmu Hukum**, Pradama Paramita, Jakarta.

Peter Mahmud, 2010, **Penelitian Hukum**, Surabaya Kencana, Surabaya.

Naskah Internet

Yance Arizona, **Apa itu Kepastian Hukum?**, <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>.

Peraturan Perundang undangan

Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang **Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 Ayat (10)**.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang **Pendaftaran Tanah, Pasal 31 ayat (1), Pasal 19 Undang undang Pokok Agraria**.

Undang undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang **Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Pasal 20 ayat (2)**.